

Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Madidir Kota Bitung

Gilbert Johanis Siby

Arie J. Rorong

Helly F. Kolondam

gilbertsiby21@gmail.com

JAP No.1 Vol. X (2024)

Hal. 1- 14

Publish. 5 Jan 2024



ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Madidir Kota Bitung. Analisis ini menggunakan penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Kecamatan Madidir, Sekretaris Camat, dan Masyarakat Nelayan. Pengumpulan informasi menggunakan teknik informasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan suatu efektivitas program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan empat indikator, yaitu: (1) Ketepatan sasaran program, meskipun program telah berjalan tapi terdapat sedikit permasalahan yaitu rumitnya prosedur untuk memperoleh kartu nelayan (Kusuka); (2) Sosialisasi Program, pemerintah telah melakukan sosialisasi program terhadap masyarakat sebelum pemberian bansos kepada masyarakat yang telah memiliki kartu bantuan kusuka; (3) Pencapaian tujuan program, program yang telah dijalankan dapat dikatakan tercapai apabila pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan terlaksana secara efektivitas dan efisiensi; (4) Pemantauan program, program yang sudah terlaksana dapat dilihat dari pemantauan dari rapat berskala, serta pelaporan dan kunjungan lapangan.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Pemberdayaan

ABSTRAC

This study is to determine the effectiveness of government programs in empowering fishing communities in Madidir District, Bitung City. This analysis uses qualitative research. The informants of this research are the Head of the Marine and Fisheries Service, the Head of Madidir Sub-district, the Secretary of the Sub-district Head, and the Fishermen Community. Information collection using information, interviews, and documentation techniques. In this study, data analysis used data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show the effectiveness of government programs in community empowerment using four indicators, namely: (1) Program target accuracy, although the program has been running but there are few problems, namely the complexity of the procedure for obtaining a fisherman's card (Kusuka); (2) Program socialization, the government has conducted program socialization to the community before providing social assistance to people who already have a kusuka assistance card; (3) Achievement of program objectives, programs that have been implemented can be said to be achieved if the empowerment of marine and fisheries business actors is carried out effectively and efficiently; (4) Program monitoring, programs that have been implemented can be seen from the monitoring of the rapat.

Keywords: Effectiveness, Program, Empowerment

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang nomor dua setelah Kanada yaitu 81.000 km. Luas wilayah teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km² didominasi oleh wilayah laut yaitu kurang lebih 5,4 juta km². Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan melimpah dan tersebar disebagian besar Indonesia.

Namun dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan dan otoritas tidak punya wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan, serta pola atau budaya kerja yang masih apa adanya. Kondisi kemiskinan yang dialami nelayan menyebabkan mereka rentan konflik dan hanya menjadi objek.

Pemerintah Sendiri sebetulnya bukan tidak memahami kondisi dan tekanan perekonomian yang dialami oleh masyarakat daerah pesisir, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Pemerintah telah berupaya membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan maupun kesejahteraan masyarakat nelayan dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat.

Hukum yang seharusnya memberikan perlindungan ternyata juga tidak optimal. Dalam Undang-Undang Perikanan hanya ada 2 ayat dalam pasal 1 yang mengatur nelayan, itu pun hanya ayat yang memberikan pengertian nelayan dan nelayan kecil. Bahkan pengertian itu pun berbeda dengan pengertian nelayan tradisional dalam penjelasan pasal 18 (6) Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta dalam efektivitas pemberdayaannya di masyarakat.

Sedangkan dalam (UU No. 6 Tahun 1996 pasal 4 tentang Perairan Indonesia) berbunyi, Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, jadi semua masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan mempunyai hak yang sama untuk memberdayakan sumber-sumber kekayaan alam yang di laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemberdayaan adalah bagian tindakan yang mengacu pada proses pemberdayaan diri dan dukungan profesional dari orang-orang, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi rasa tidak berdaya dan kurangnya pengaruh, untuk mengenali dan menggunakan sumber daya mereka untuk melakukan pekerjaan dengan kekuatan yang dimiliki, proses pemberdayaan masyarakat faktanya merupakan elemen dari empat fungsi

pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut sudah terbagi empat bagian fungsi pemerintahan, yaitu pemberdayaan, pembangunan, pengaturan, dan pelayanan. Adapun fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu akan menggambarkan kinerja pemerintah itu sendiri jika pemerintahan berikutnya dapat meneruskan kewajibannya dengan maksimal, maka tugas pokok dapat dijalankan dengan sempurna contohnya pelayanan menghasilkan keadilan, pemberdayaan menghasilkan kemandirian, dan pembangunan menghasilkan kemakmuran.

Pemberdayaan masyarakat kini telah menjadi agenda penting dan mutlak dilakukan setiap pemerintah daerah, dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Akan tetapi pada kenyataannya, upaya pemerintah daerah selama ini dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah. Oleh karena itu, pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Sumber perikanan di Indonesia tidak terlepas dari namanya Kota-Bitung, Kota-Bitung merupakan kota administratif di provinsi Sulawesi Utara, yang termasuk kota penghasil ikan terbesar di Indonesia, data terakhir yang di ambil dari (Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara) produksi ikan di Kota-Bitung tahun 2020 adalah 97.584,00 ton.

Masyarakat yang ada di kota Bitung, contohnya di kecamatan Madidir, memiliki banyak potensi guna membantu, menunjang dan mendukung program-program pembangunan di kota Bitung. Potensi yang dapat digali dan lebih diberdayakan pada masyarakat di kecamatan Madidir yang berada di wilayah pesisir pantai, sehingga banyak penduduk di kecamatan Madidir bermata pencaharian sebagai nelayan.

Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat nelayan menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal secara ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan dan kultural dibanding dengan kelompok masyarakat lain. Pemerintah telah berupaya, tetapi masih ada nelayan yang kesulitan dalam meningkatkan taraf hidupnya dan berada dibawah garis kemiskinan sehingga para nelayan tetap tidak berdaya. Hal ini mungkin dikarenakan kurang maksimalnya upaya yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan seperti kurangnya pendidikan dan pembinaan. Selain itu, pemerintah kurang memfasilitasi nelayan dalam hal memberikan akses

informasi dan teknologi yang masih sulit didapatkan oleh nelayan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah kecamatan madidir menerbitkan kartu nelayan (Kusuka), kartu ini ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, kartu kusuka ini berfungsi juga sebagai identitas profesi pelaku usaha.

Program kartu kusuka ini sudah berjalan tetapi belum semua merasakan kegunaan kartu tersebut, dikarenakan masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Madidir belum sepenuhnya tau akan manfaat program kartu nelayan, dalam memudahkan profesi mereka sebagai nelayan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu di analisis lebih mendalam dan diketahui lebih jelas mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan hal tersebut, atas dasar permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang, maka penulis tertarik melakukan penelitian mendalam terhadap Efektivitas Program Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Madidir Kota-Bitung

TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti Terdahulu

1. Giffried R. Rumpia, Burhandin Kiayi, Helly F. Kolondam (2019) dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi: Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara). Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif searah dengan persoalan yang diteliti. Pendekatan kualitatif ini menggunakan pemikiran induktif dalam mencari pola-pola umum yang spesifik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur perdesaan Desa Bulude menurut tiga indikator kinerja, dimulai dari kinerja Program Pembangunan Prasarana Perdesaan (PPIP), menurut indikator pencapaian tujuan (2) efisiensi. program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) menurut indikator integrasi (3) efektivitas program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) menurut indikator adaptasi. Tepat waktu dan tepat sasaran dimana program telah disosialisasikan atau disosialisasikan dalam musyawarah desa dan pelaksanaannya di lapangan dilakukan secara bertahap dan patuh.
2. Marsela Gonta, Arie J. Rorong, Very Londa (2022) dengan judul Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Sulawesi Utara Dan Gorontalo Cabang Ratahan Kabupaten Minahasa

Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan teknik trigulasi dan analisis data yang bersifat induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BSG cabang Ratahan berjalan secara efektif, hal ini berdasarkan pada empat indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas program dengan menggunakan indikator-indikator yang menjadi tujuan dari sasaran program, tujuan program, sosialisasi program dan pengawasan program.

3. Ivone J. Kondoy, Arie J. Rorong, Helly F. Kolondam (2022), dengan judul Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Dengan permasalahan kemiskinan yang disebabkan oleh dua faktor yaitu rendahnya pendidikan dan kurangnya kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola sumber daya alam yang ada.
4. Meila Sari Arebaang, Arie J Rorong, Joyce J Rares (2022) dengan judul Efektivitas Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan

Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Bumdes Simpan Pinjam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Melalui BUMDes Desa Jiko Belanga mengadakan kegiatan program simpan pinjam desa. BUMdes simpan pinjam desa dihadirkan untuk membantu masyarakat desa yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mempermudah masyarakat dalam mencari modal usaha dan keperluan masyarakat lain yang mampu melepaskan masyarakat dari masalah kemiskinan. BUMDes juga berperan untuk meningkatkan PADes (pendapatan asli desa) dan juga sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Konsep Efektivitas

efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana

kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait.

Menurut Mardiasmo.2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Amin Tunggal Widjaya (1993: 32) Efektivitas adalah hasil keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.

Menurut Ravianto (2014 : 11) efektivitas adalah sesuatu hal yang menjadi ujung tombok dalam mengukur baik tindakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan dianggap efektif apabila dikerjakan sesuai dengan konsep yang telah dirancang baik dari segi waktu, biaya dan kualitasnya.

Menurut Gibson (2013: 46) Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.

Konsep Program

Konsep program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya akan dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan

Menurut Hans Hochholzer (2012:11) Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan.

Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat continue, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan.

Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Konsep Nelayan

Nelayan adalah penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah sumber daya laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir (Sastrawidjaya, 2002). Ciri

komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut:

1. Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
2. Dari segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong-menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
3. Dari segi tampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang di turunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moeleng, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

- a. Kepala Kecamatan Madidir,
- b. Sekretaris Kecamatan Madidir
- c. Dinas Perikanan kota Bitung
- d. Masyarakat nelayan di Kecamatan Madidir Kota Bitung.

Adapun yang menjadi fokus penelitian yang terkait dengan efektivitas program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Madidir Kota Bitung dengan menggunakan 4 langkah

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Pencapaian Tujuan Program
4. Pemantauan Program

Hasil dan Pembahasan

Ketepatan Sasaran Program

Dalam pemenuhan pemberdayaan masyarakat nelayan, program merupakan salah satu dari kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah agar menimbulkan efek sistematis dan terencana yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, keunggulan komperatif, potensi dan tantangan.

Program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, biasanya

menyangkut jangka waktu penyelesaian, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, dan tanggung jawab serta kejelasan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, program kartu nelayan “Kusuka” yang telah diterbitkan oleh Camat Madidir selaku organisasi pemerintah pada tahun 2016 telah berupaya dengan adanya program kartu nelayan yang dikeluarkan sehingga melalui program Kusuka tersebut nelayan pun dipermudah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Program kartu nelayan juga diharapkan menjadi materi kongkrit dalam proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengolahan sumber daya perikanan dan upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Namun ada beberapa hal yang menjadi isu tersendiri dalam penyaluran program Kusuka, permasalahan ini ditandai dengan kondisi atau fakta yang ada di lapangan. Beberapa isu yang menjadi pertimbangan dalam keefektifitasan program Kusuka

1. Rumitnya prosedur untuk memperoleh kartu nelayan (Kusuka) dikarenakan nelayan dengan skala kecil harus menggunakan surat rekomendasi dari perangkat daerah.
2. Belum adanya transparansi data kuota untuk penerima kartu Kusuka

Program Kusuka seharusnya bertujuan untuk memberikan pelayanan dasar, dan merevitalisasi ekonomi masyarakat serta

memudahkan dan memperlancar hubungan antar masyarakat nelayan dengan perangkat daerah kecamatan Madidir. Meskipun program Kusuka menunjukkan perkembangan cukup baik, namun efektivitas program Kusuka belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya permasalahan di lapangan.

Sosialisasi Program

Pentingnya bahwa program harus disampaikan kepada masyarakat dalam hal ini Camat Madidir, Kota Bitung dipandang sebagai salah satu perpanjangan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat dalam hal ini penyebaran informasi. Selain itu Camat Madidir harus mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka mewujudkan sosialisasi program Kusuka

Merujuk pada kepentingan untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat, pemerintah harus bisa menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan, serta menerangkan dan menginformasikan kepada masyarakat nelayan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan program Kusuka.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan dengan cara memberikan program agar dapat membantu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, dengan cara melakukan sosialisasi kepada perangkat kecamatan dan perangkat kelurahan dan sudah di realisasikan dan terlaksana dengan baik.

Dengan adanya kartu program ini diharapkan masyarakat nelayan dapat menerima bantuan sosial yang disalurkan setiap tahunnya.

Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya yang dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan ini terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi, seperti waktu, sasaran atau target, dan dasar hukum.

Untuk mencapai tujuan program yang telah dibuat, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan pelayanan umum sebagai bentuk dukungan dari pemerintah kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan agar dapat mengembangkan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pencapaian program Kusuka sebagaimana disebutkan di atas dapat dicapai apabila perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi yang terlaksana. Salah satu point penting yang bisa diterapkan dalam pencapaian program Kusuka adalah pemberdayaan masyarakat dibidang kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaannya, program yang di buat oleh pemerintah sudah terlaksana serta mencapai tujuan yang

telah ditargetkan sebelumnya karena dari perencanaan sampai pelaksanaannya sudah sangat bermanfaat bagi masyarakat nelayan yang ada di kecamatan madidir. Masyarakat nelayan di madidir sudah banyak menerima bantuan dari program tersebut.

Pemantauan Program

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Dengan kata lain pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pemerintah Kota Bitung khususnya, pemerintah Kecamatan Madidir melakukan pemantauan :

1. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara continue (terus menerus) mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;
2. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin
3. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan

Pelaksana pemantauan untuk sebuah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah masing-masing Pengelola Kegiatan/Satker di daerah serta komponen pembina/penanggung jawab kegiatan pusat, yang hasilnya menjadi input bagi perumusan kebijakan selanjutnya.

Lingkup pemantauan terdiri dari seluruh aspek yang berkaitan dengan program/kegiatan baik aspek perencanaan, aspek penyaluran/pencairan dana, aspek pelaksanaan maupun aspek pelaporan. Bentuk pemantauan dapat melalui rapat berkala, Pelaporan maupun kunjungan lapangan, objek pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana kerja, dengan fokus pelaksanaan program dan kegiatan dan bentuk produk (akhir) pemantauan adalah laporan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi peneliti di atas tentang efektivitas program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di kecamatan madidir, kota Bitung dapat dikatakan efektif dengan beberapa catatan, hal ini dapat dilihat dari:

1. Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Madidir bersama dinas Kelautan dan Perikanan dalam membuat program kartu nelayan, dimana pada awal pembentukan program berjalan dengan lancar dan menjadikan masyarakat nelayan terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. tetapi setelah programnya berjalan terdapat beberapa kendala yang di alami langsung oleh masyarakat nelayan seperti rumitnya prosedur untuk dapat mengakses bantuan kartu nelayan serta tidak adanya transparansi yang jelas akan batas jumlah penerima bantuan kartu Kusuka.
2. Dalam pelaksanaan program Kusuka, Pemerintah Kecamatan Madidir telah melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan dengan cara melaksanakan program agar membantu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, kemudian melakukan sosialisasi kepada perangkat kecamatan dan perangkat

kelurahan dan sudah di realisasikan dan terlaksana dengan baik. Dengan adanya kartu program ini diharapkan masyarakat nelayan dapat menerima bantuan sosial yang disalurkan setiap tahunnya.

3. Dalam kaitannya dengan pencapaian program, pencapaian tersebut dapat tercapai apabila adanya perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi yang terlaksana sehingga masyarakat nelayan di kecamatan madidir dapat memperoleh bantuan kartu Kusuka hingga saat ini.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan suatu program mencakup tahapan mulai dari analisis masalah kemudian dirumuskan yang dimana dalam proses program tersebut telah menjadi pedoman perangkat daerah dalam pemantauan dan pelaporan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pemerintah sudah melaksanakan monitoring atau evaluasi program yang dapat berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko, dengan demikian perlu adanya kajian kembali yang dilakukan untuk dapat melihat keefektivitasan program yang sudah terlaksana terkait dengan pemberdayaan masyarakat sehingga nantinya dapat diketahui apakah

program tersebut benar-benar memberikan manfaat.

Saran

1. Perlu adanya kejelasan lebih mendalam tentang program kartu nelayan agar memudahkan masyarakat dalam mengakses program kartu nelayan sehingga menghadirkan program yang terarah dan saling melengkapi serta dibutuhkan transparansi dari pemangku pemerintah akan kuota penerima bantuan kartu Kusuka.
2. Perlu adanya perhatian lebih mendalam terkait manajemen sumber daya kelautan dan perikanan dalam bentuk sosialisasi, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat mengerti dan memahami secara benar serta diharapkan realisasi usulan program dapat meningkatkan efektivitas program kartu Kusuka.
3. Untuk mencapai target dari sebuah program perlu peningkatan percepatan pelayanan dari pemerintah Kecamatan Madidir terhadap masyarakat nelayan dalam membuat kartu Kusuka agar program yang sudah terlaksana, hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mematangkan program kartu Kusuka kedepannya.
4. Dalam melakukan monitoring pemerintah harus mengkaji lagi dampak dari program kartu Kusuka yang sudah terlaksana agar dapat melihat keefektifitasan program yang sudah

terlaksana terkait dengan pemberdayaan masyarakat sehingga nantinya dapat diketahui apakah program tersebut benar-benar memberikan manfaat.

Daftar Pustaka

- Aditama. Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. PT Refika Aditama
- Arebaang, Sari Meila. Rorong, J Arie. dan Rares J Joyce, 2022. Efektivitas Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Negara, Vol 8 : 120*
- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Sosial Vol 2 No.1*
- Gibson. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Keempat*. Jakarta. Erlangga
- Gonta Marsela. Rorong, Arie. dan Kolondam, Helly F. 2022. Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Sulawesi Utara Dan Gorontalo Cabang Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Negara*. <http://www.unsrat.ac.id>

- Hans, Hochholzer. 2012. Central and Regional Government. Jakarta: *Gramedia*
- Kondoy, Ivone. Rorong, J Arie. dan Londa, Very, 2022. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Kasawari. *Jurnal Administrasi Negara, Vol 8* : 120. [http://www.unsrat.ac id](http://www.unsrat.ac.id)
- Iskandar. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan. Kualitatif). Jakarta. *Gaung Persada Press*
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Rineka Cipta
- Kondoy, Ivone. Rorong, Arie. dan Londa, Very, 2022. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Kasawari. *Jurnal Administrasi Negara, Vol 8* : 120. [http://www.unsrat.ac id](http://www.unsrat.ac.id)
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan Edisi Terbaru* Jakarta: Andy
- Nyoman, Sumaryadi I. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Parson, 1994, *The Integration Of Social Work Practice*. California Wardworth Issue. USA
- Ravianto, 2014, *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta: Binamaan Aksara
- Rumpia, R Giffried. Kiayi, Burhanudin dan Kolondam, Helly F. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi : Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara) *Jurnal Administrasi Vol 5:74*. [http://www.unsrat.ac id](http://www.unsrat.ac.id)
- Sudjana, Nana. 1990. *Teori-teori Belajar Untuk Pengajaran*. Bandung: Fakultas Ekonomi UI
- Slamet, 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting Oleh Ida Yustina dan Adjat Sudrajat Bogor. IPB Press
- Suhendra, 2006, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda. Jakarta. ElexMediaKomp utindo. https://media.neliti.com/media/publications/52809-ID_peran-pondamping_dalam-program-pondamping.pdf
- Sunyoto Usman, 2004 *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Steers, Richard M. 1985 *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku* (Alih Bahasa Magdalena). Jakarta Erlangga

Widjaja, Tunggal Amin. 1993. *Sistem Informasi Akutansi*. Jakarta. Jakarta Rineka Cipta

Sumber Lainnya

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Pengaturan, Pembangunan, dan Pelayanan

UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

UU Peraturan pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

UU Nomor 32 tahun 2014 Daerah Kelautan Indonesia

UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidayaan Ikan